

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan |
| | 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih |
| | 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |
| | 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB VIII | PENUTUP |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Guna mengoperasionalkan program yang ada dalam RPJMD, Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana strategis Perangkat Daerah yang menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra Perangkat Daerah harus terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di era globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini telah mengalami perubahan. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah dengan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur

rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Program RPJMD yang termasuk bidang urusan lingkup Dinas Perhubungan perlu ditampung dalam kegiatan-kegiatan yang kemudian diwujudkan menjadi visi Dinas Perhubungan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan. Penyusunan kegiatan perlu memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan RPJMD sebelumnya, proyeksi lima tahun ke depan, skala prioritas dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga rencana strategis Dinas Perhubungan yang dirumuskan dengan prinsip bertindak cepat dan tepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar, maka disusunlah Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Untuk menyusun Rencana Strategis ini didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 25)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga akan terwujud sinergi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan dibidang transportasi.

2. Tujuan :

Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun bertujuan untuk menjabarkan misi ke-4 RPJM Kabupaten Tanah Datar 2016-2021 dalam bentuk program dan kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun secara sistematis yang merupakan kompilasi dari berbagai permasalahan Urusan Perhubungan di Kabupaten Tanah Datar.

Dokumen ini disusun dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Perhubungan, Fungsi Renstra Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Perhubungan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD

provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran dari uraian isi RENSTRA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

A. TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan, yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

B. FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana lalu lintas;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan berdasarkan Perda nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 1. Seksi Prasarana.
 2. Seksi Pengembangan
 3. Seksi Keselamatan.
- d. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan.
 2. Seksi Lalu Lintas.

3. Seksi Pengujian Kendaraan bermotor

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas, melaksanakan urusan pemerintah dibidang Perhubungan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, dan lalulintas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan perhubungan;
 - b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang perhubungan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

C. Kabid Lalu Lintas

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu lintas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Lalu Lintas;
 - c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Lalu Lintas berdasarkan skala prioritas;
 - d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
 - g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

D. Kabid Keselamatan Sarana dan Prasarana

- (1) Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
 - c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana berdasarkan skala prioritas;
 - d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;
- g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

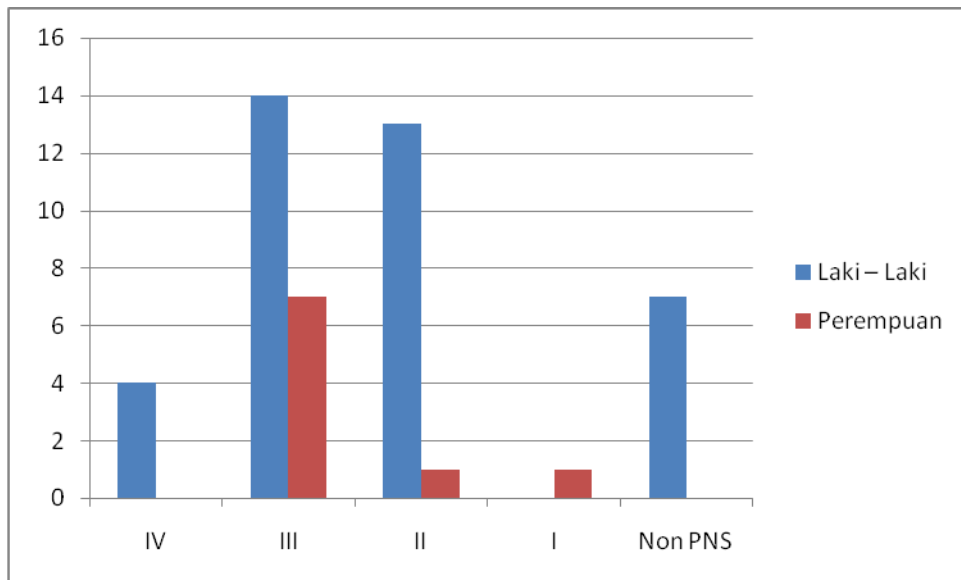
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017, terdapat 40 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 Orang Pegawai Honorer/Kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Golongan | | | | Tenaga Honor/Kontrak |
|----|---------------|----------|-----|----|---|----------------------|
| | | IV | III | II | I | |
| 1. | Laki – Laki | 4 | 14 | 13 | 0 | 7 |
| 2. | Perempuan | - | 7 | 1 | 1 | 0 |
| | Jumlah | 4 | 21 | 14 | 1 | 7 |

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



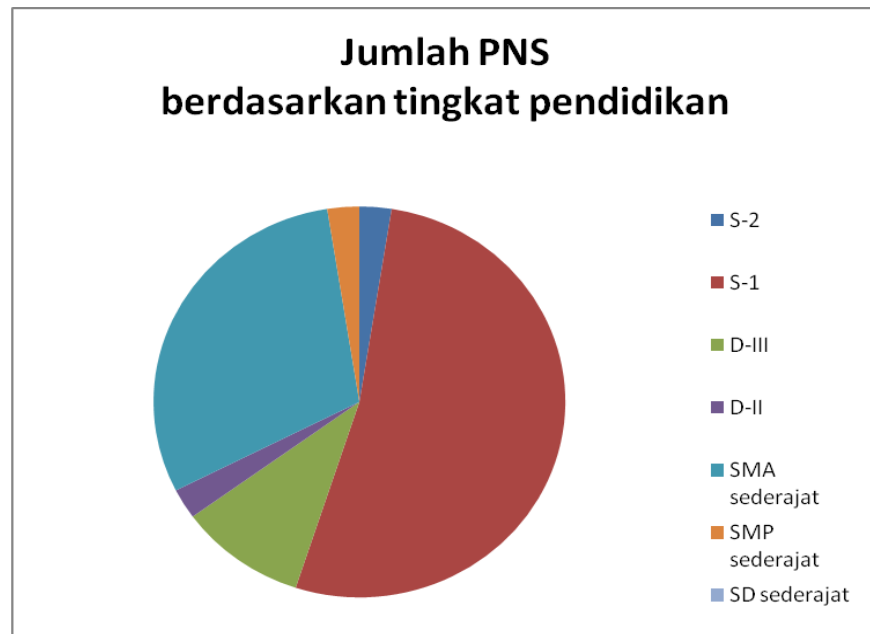
Data pegawai berdasarkan pembagian per Bidang.

| NO | UNIT KERJA | PNS | HONORER | JUMLAH |
|----|--------------------|-----|---------|--------|
| 1. | Sekretariat | 10 | 4 | 14 |
| 2. | Bidang TKSP | 19 | 3 | 22 |
| 3. | Bidang Lalu Lintas | 11 | - | 11 |
| | Jumlah | 40 | 7 | 47 |

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

| No. | Tingkat Pendidikan | PNS | NON PNS | JUMLAH |
|-----|--------------------|-----|---------|--------|
| 1. | S-2 | 1 | - | 1 |
| 2. | S-1 | 21 | 2 | 23 |
| 3. | D-III | 4 | - | 4 |
| 4. | D-II | 1 | - | 1 |
| 5. | SMA sederajat | 12 | 3 | 12 |
| 6. | SMP sederajat | 1 | 1 | 2 |
| 7. | SD sederajat | - | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 40 | 7 | 47 |

Dapat dilihat seperti grafik berikut ini :



Adapun jumlah asset yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dapat dilihat pada tabel berikut :

Asset Dinas Perhubungan

| No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------|---------|---|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 6 Unit | 2 unit baik 2 unit rusak ringan 1 unit rusak sedang 1 unit rusak berat |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 4 Unit | 2 unit baik 2 unit rusak sedang |
| 3 | Meja | 37 Buah | Baik |
| 4 | Lemari | 9 Unit | Baik |
| 5 | Lap Top | 9 Unit | 6 unit baik 2 rusak ringan 1 rusak berat |

| | | | |
|---|----------|---------|--|
| 6 | Komputer | 9 Unit | 5 unit baik 2 unit rusak ringan 2 unit rusak berat |
| 7 | Printer | 10 Unit | 5 baik 3 rusak ringan 2 rusak berat |
| 8 | Kursi | 67 Buah | 60 buah baik 7 buah rusak sedang |

4.2 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Kabupaten Tanah Datar awalnya memiliki terminal regional yang berlokasi di Piliang Dobok yang pada tahun 2017 ini beralih kewenangan ke Dinas Perhubungan Propinsi Sumbar. Selain itu terminal yang masih dimiliki adalah terminal Angkutan Pedesaan di Pasar Papan, dan Terminal Angkutan Kota di Jati Kecamatan Lima Kaum. Kondisi terminal ini sangat jauh dari memadai, sarana dan prasarana pendukung sangat minim seperti pagar yang tidak memadai, bangunan pendukung, toilet, tower, loket dan lain-lain, kondisi ini mengakibatkan sulitnya menciptakan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang memanfaatkannya.

Disamping perhubungan yang baik, jenis dan kualifikasi angkutan serta sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran arus orang, barang dan jasa.

Jumlah angkutan umum yang masuk dan keluar terminal di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu barometer peningkatan income masyarakat Tanah Datar.

**DATA JUMLAH ANGKUTAN UMUM DAN PENUMPANG YANG MASUK
KELUAR TERMINAL JATI BATUSANGKAR**

| No. | Tahun | Masuk | | Keluar | |
|-----|-------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kendaraan (Unit) | Penumpang (Orang) | Kendaraan (Unit) | Penumpang (Orang) |
| 1 | 2010 | 28.800 | 259.200 | 28.800 | 361.800 |
| 2 | 2011 | 26.600 | 239.400 | 26.600 | 292.600 |
| 3 | 2012 | 16.000 | 154.000 | 16.000 | 176.000 |
| 4 | 2013 | 11.200 | 100.800 | 11.200 | 123.200 |
| 5 | 2014 | 10.750 | 99.650 | 10.750 | 99.650 |
| 6 | 2015 | 10.115 | 97.645 | 10.115 | 97.645 |

Data di atas menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan jumlah kendaraan yang masuk dan keluar terminal jati setiap tahun. Sejak Tahun 2010 penurunan cukup tajam sampai akhir tahun 2015. Demikian juga halnya dengan jumlah penumpang semua mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini disebabkan maraknya angkutan alternative seperti ojek, kendaraan angkutan barang (L-300) yang dijadikan angkutan orang dan ditambah lagi dengan kondisi angkutan kota yang relative sudah tua dan jumlahnya yang semakin berkurang. Kemudian kecenderungan para pengusaha angkot tidak menambah atau meremajakan armada mereka .

Untuk mengawasi kelayakan operasional kendaraan angkutan umum dan barang, khusus di bidang Pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dengan peralatan yang sederhana dan masih manual, sedangkan Daerah tetangga seperti Padang panjang dan Kota Payakumbuh sudah mempunyai Gedung dan alat pengujian secara mekanik.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang ditangani Dinas Perhubungan dilakukan terhadap jenis kendaraan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Jenis Kendaraan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - Mobil Penumpang | 32 | 58 | 43 | 53 | 60 | 67 | 69 |
| - Angkutan Sewa | 14 | 30 | 28 | 16 | 3 | - | - |
| - Mobil Bus | 495 | 796 | 764 | 785 | 756 | 696 | 699 |
| - Mobil Barang | 2034 | 4395 | 4809 | 5262 | 5666 | 5732 | 5762 |
| Jumlah | 2575 | 5279 | 5644 | 6116 | 6485 | 6495 | 6530 |

4.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah destinasi wisata Propinsi Sumatera Barat yang ramai dikunjungi wisatawan terutama pada musim liburan baik akhir pekan maupun cuti bersama, oleh karena kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar yang bergelombang dan rawan kecelakaan lalu lintas, maka dibutuhkan perencanaan dan penataan sistim transportasi yang mengedepankan faktor keselamatan pengguna jalan dan penerapan aplikasi teknologi informasi yang menunjang kepariwisataan.

Untuk mengikuti perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang, maka beberapa tantangan yang harus diantisipasi dan diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pertumbuhan kendaraan roda 2 dan roda 4 di Indonesia yang meningkat setiap tahunnya (Roda 2, \pm 7.000.000 unit/Tahun, Roda 4 \pm 800.000 unit/Tahun) yang tidak seimbang dengan pertumbuhan panjang jalan, sehingga menyebabkan padat dan macetnya arus lalu lintas pada jalan nasional, jalan propinsi dan Kota Batusangkar.
2. Semakin berkembangnya alat angkutan orang yang tidak diperuntukkan sebagai angkutan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas untuk mengantisipasi meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan seperti trotoar, rambu, marka jalan beserta alat pengujian kendaraan mekanis.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang semakin kompleks.

Dari tantangan tersebut diatas terdapat beberapa peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan keselamatan kendaraan wajib uji apabila Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat menyediakan alat uji kendaraan dengan sistim mekanis sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Tersedianya tahapan pembangunan sistim transportasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Untuk dapat lebih memfokuskan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam pencapaian visi, misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi.

Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar kendali.

Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan Faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

Analisis Faktor Internal.

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memenuhi kompetensi teknis perhubungan dan tuntutan tugas yang semakin kompleks.
- b. Belum tersedianya fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang mekanis sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan pengujian hanya dilakukan secara manual dan hasilnya dapat diperkirakan tidak akurat.
- c. Terbatasnya anggaran untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.
- d. Masih kurangnya sarana mobilitas untuk mendukung kelancaran tugas-tugas operasional lapangan dalam rangka penertiban kelancaran lalu lintas.

- e. Masih kurangnya komitmen sumber daya manusia dalam penegakan disiplin dilapangan.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai.

Analisis Faktor Eksternal.

- a. Kabupaten Tanah Datar terletak pada daerah perlintasan antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi yang selalu ramai dikunjungi oleh tamu atau wisatawan.
- b. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, sehingga dibutuhkan bantuan alokasi anggaran dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Kementerian Perhubungan RI.
- c. Cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang harus diimbangi dengan peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur dan penyediaan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan melalui kerjasama dengan pihak yang berkompeten didalam negeri maupun diluar negeri.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Pada RPJM 2016-2021, visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tanah Datar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah : **"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani berbudaya dan sejahtera dalam nilai – nilai adat basandi', syara' basandi kitabullah"**. Untuk mewujudkan visi tersebut Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 misi dan 7 agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat,cerdas dan berkarakter berdasarkan falsafah ABS-SBK.
- 3. Mewujudkan Kehidupan harmonis, aman ,teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
- 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah.

7 Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Agama, Adat dan Budaya.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan Kesehatan dan kelembagaan keuangan.
4. Meningkatkan Ekonomi , pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
5. Meningkatkan Infrastruktur Daerah.
6. Penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI.

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar juga harus merujuk pada Renstra Nasional dan Renstra kementerian perhubungan untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pembangunan perhubungan nasional sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat kegiatan dibidang transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok tanah air dan antar negara. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perhubungan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan transportasi dalam kurun waktu 2016-2021 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci

bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas keseluruhan wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun visi Kementerian Perhubungan adalah **“TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH.”**

Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri, dan produktif.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan penegakkan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaan visi dan misi Kementerian Perhubungan tersebut diatas dituangkan tujuan sebagai berikut :

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi

yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi daya guna dan minimalisasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi nasional tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal.
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi.
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan serta antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Berdasarkan letak administrasinya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Solok
- Sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah timur, berbatasan dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas sekitar 1.336 km² atau 133.600 hektar, yang terletak pada 00°17" - 00°39" Lintang Selatan dan 100°19" - 100°51" bujur timur dan memiliki 14 kecamatan dengan 75 nagari yang memiliki komposisi luas lahan sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1

Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

| No | Kecamatan | Luas (Ha) | Persentase (%) | Ketinggian (m.dpl) |
|----|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | X Koto | 15.202 | 11,45 | 700 - 1.000 |
| 2 | Batipuh | 14.426 | 10,80 | 500 – 850 |
| 3 | Batipuh Selatan | 8.273 | 6,19 | 500 – 850 |
| 4 | Pariangan | 7.643 | 5,72 | 500 – 800 |
| 5 | Rambatan | 12.915 | 9,67 | 600 – 700 |
| 6 | Lima Kaum | 5.000 | 3,74 | 450 – 550 |
| 7 | Tanjung Emas | 11.205 | 8,39 | 450 – 550 |
| 8 | Padang Ganting | 8.350 | 6,26 | 450 – 550 |
| 9 | Lintau Buo | 6.022 | 4,51 | 200 – 750 |
| 10 | Lintau Buo Utara | 20.431 | 15,21 | 200 – 750 |
| 11 | Sungayang | 6.545 | 4,90 | 400 – 750 |
| 12 | Sungai Tarab | 7.185 | 5,38 | 450 – 550 |
| 13 | Salimpaung | 6.088 | 3,94 | 750 - 1.000 |
| 14 | Tanjung Baru | 4.315 | 3,84 | 750 - 1.000 |
| | J u m l a h | 133.600 | 100,00 | |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka 2010, BPS Kabupaten Tanah Datar

Pada umumnya topografi Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah bergelombang dan berbukit-bergunung dengan rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.4.2

Topografi dan Kemiringan Lahan di Kabupaten Tanah Datar

| No | Topografi | Kemiringan (%) | Luas (ha) | Persentase (%) |
|----|--------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1 | Datar | 0-3 | 6.160 | 4,61 |
| 2 | Berombak | 3-15 | 3.567 | 2,67 |
| 3 | Bergelombang | 15-25 | 44.023 | 32,95 |
| 4 | Berbukit-Bergunung | >25 | 79.850 | 59,77 |
| | J u m l a h | | 133.600 | 100,00 |

Sumber: Tanah Datar Dalam Angka 2010, BPS Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan bentuk geomorfologinya, wilayah Kabupaten Tanah Datar mempunyai tiga kelompok bentang darat, yaitu:

1. Wilayah kipas vulkanik gunung api yang tersebar di kecamatan X Koto, Batipuh, Batipuh Selatan, Lima Kaum, Rambatan, Sungai Tarab, dan Salimpaung,
2. Wilayah berbukit-bukit yang tersebar di kecamatan X Koto, Sungayang, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, dan Padang Ganting,
3. Wilayah dataran alluvial dan teras sungai yang tersebar sepanjang aliran sungai utama seperti Batang Sinamar Hilir, Batang Ombilin, dan Batang Selo.

Berdasarkan peta geologi lembaran Padang dan lembaran Solok, Kabupaten Tanah Datar secara geologi mempunyai beberapa formasi geologi:

1. Anggota bawah formasi Ombilin batu kuarsa yang mengandung mika, sisipan arkose, serpih lempungan (liat), konglomerat kuarsa, dan batubara
2. Anggota filit dan serpih formasi Kuantan, serpih dan filit sisipan batusabak, batu lanau, rijang, dan aliran lava
3. Andesit dari gunung berapi dan lahar di sekeliling gunung Merapi, konglomerat dan endapan-endapan kolovium di bagian barat dan danau Singkarak
4. Granit kapur bersusunan leuco-granit sampai monzonit kuarsa, umumnya bertekstur faneritik-forfiritik
5. Formasi brani, konglomerat dengan sisipan pasir dan batu apung.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.

Pada era global peran transportasi sangat ditentukan oleh pasar yang dicirikan oleh semangat persaingan yang tajam. Oleh karena itu dari aspek permintaan (*demand side*), kebijakan efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi dalam penyelenggaraan transportasi lokal merupakan syarat mutlak agar dapat bersaing dipasar global. Dari sisi penawaran (*supply side*), kebijakan penambahan kapasitas dan pembangunan sarana serta prasarana transportasi harus diupayakan memenuhi persyaratan teknis dan layak dioperasikan dengan biaya terendah (*least cost*) dalam kerangka biaya jangka panjang (*long run variable cost*).

Minimnya fasilitas infrastruktur sektor transportasi yang disediakan pemerintah daerah tentunya akan menghambat pengembangan sektor-sektor lainnya sehingga pada gilirannya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.

1. Kekuatan.

Mengundang investor swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi akan menghemat pengeluaran pemerintah, memacu pemasukan modal secara langsung (*capital inflow*) yang akan memperkuat neraca pembayaran, menyehatkan fiskal, memperluas lapangan kerja dan pada gilirannya melalui faktor pemicu dampak ganda akan meningkatkan pendapatan daerah. Tingkat pelayanan transportasi dapat memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Peran transportasi pada era globalisasi menjadi semakin dominan mengingat dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya transportasi tidak mengenal sekat-sekat administratif baik batas daerah maupun nasional. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor perkuatan daya saing produk lokal agar mampu bersaing dengan produk asing yang pada era globalisasi membanjiri wilayah Republik Indonesia.

2. Kelemahan.

Sebagai akibat terjadinya krisis keuangan global yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja APBD dimana tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur sektor transportasi. Menyerahkan pengoperasian infrastruktur transportasi kepada swasta akan memperlemah kontrol pemerintah, terutama dalam pengalokasian sumber daya akibat terjadi distorsi pasar.

3. Peluang.

Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta swasta akan membuka peluang alih teknologi serta peluang perluasan pangsa pasar, terutama untuk segmen usaha yang memiliki pasar pada skala global.

4. Ancaman.

Ketidaksiapan infrastruktur maupun operator transportasi daerah khususnya dalam era globalisasi tentunya merupakan ancaman bagi menurunnya daya saing lokal mengingat perusahaan-perusahaan swasta daerah dibidang transportasi yang tidak siap bersaing akan mengalami kebangkrutan dan gulung tikar karena persaingan modal kerja yang tidak seimbang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Satuan Dinas Perhubungan (Renstra) merupakan proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode 2016-2021 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan yang diinginkan Dinas Perhubungan kabupaten Tanah Datar dalam jangka panjang.

Mengacu pada konsep visi di atas dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mempunyai keinginan untuk mendukung upaya pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan upaya-upaya yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis ini. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar menetapkan Visi sebagai berikut :

***Terwujudnya Kenyamanan Transportasi
di Kabupaten Tanah Datar***

Terwujudnya kenyamanan pelayanan transportasi adalah rasa aman dan tenteram yang dirasakan pengendara dan penumpang angkutan umum baik dalam pelayanan maupun dalam saat dikendaraan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mengedepankan sikap profesionalisme dan melayani dengan

sempurna hati setiap kebutuhan masyarakat akan lancarnya sistem transportasi angkutan penumpang dan barang, sehingga terwujudnya keselamatan yang menggunakan sarana dan prasarana lalu lintas serta akses terakomodirnya fasilitas informasi bagi masyarakat.

Misi merepresentasikan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi, yang telah dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Transportasi**
- 2. Meningkatkan Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas**

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.

Hal ini dimaksudkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar mampu mencapai tujuan dan sasarnya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam waktu tertentu dan target tertentu. Tujuan merupakan pernyataan visi yang dijabarkan dalam misi organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan, sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan Adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dan

keberhasilan dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Adapun tujuan dan sasaran strategik yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah (5 Tahunan) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|---|--|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1 | Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas berkondisi baik | 56.88 | 58.75 | 60.63 | 62.50 | 64.38 | 66.25 |
| | | Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan | Persentase kendaraan angkutan umum dan barang yang layak jalan | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| | | | Peningkatan PAD dari sektor perhubungan | 56.88 | 58.75 | 60.63 | 62.50 | 64.38 | 66.25 |
| | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD | Prediket akuntabilitas kinerja OPD | | | B | B | B | BB |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi secara umum dapat diartikan sebagai langkah-langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah dirumuskan. Arah kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman yang memberi arah dan batasan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Jadi strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah dengan lebih efektif dan efisien. Adapun Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| MISI : 1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi | | | |
|--|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Meningkatkan prasarana lalu lintas | Peningkatan prasarana lalu lintas |
| MISI : 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas | | | |
| Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas | Meningkatnya pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan | Melaksanakan pengamanan jalan dan pengujian kendaraan bermotor | Penyusunan aturan hukum mengenai kendaraan yang layak jalan |

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih menfokuskan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala, dan kelemahan yang dihadapi termasuk Sumber Daya, dana, sarana, dan Prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan meliputi :

- Penempatan aparatur sesuai dengan bidang keahlian sehingga organisasi dapat berjalan optimal;

- Meningkatkan profesionalisme dan moral dari Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan Pengawasan kegiatan;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama kemitraan dengan seluruh jajaran pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang terkait;
- Mensosialisasikan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM);
- Melakukan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Bidang Perhubungan
- Pemanfaatan Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Bidang Perhubungan
- Penambahan alokasi dan pemanfaatan dana pembangunan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dilakukan evaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan.
- Tersedianya gedung dan alat uji mekanis Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dijelaskan rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Sumber dana untuk melaksanakan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar

Pagu indikatif, Daftar Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Dinas Perhubungan sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar tidak terlepas dari rencana pembangunan jangka menengah dimana tujuan dari penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah guna untuk mensukseskan program pembangunan di Kabupaten Tanah Datar.

Bila dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 keterkaitannya dengan rencana strategis Dinas Perhubungan adalah pada misi ketiga dari RPJMD Kabupaten Tanah Datar yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan Sehingga Dapat Mengurangi Angka Kemiskinan dan Pengangguran Melalui : a) Peningkatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas, sektor Pariwisata dan Sektor Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, b) Pengembangan Kawasan Strategis, dan c) Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Serta Mewujudkan Lingkungan Yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan".

Tujuan Kelima yaitu "Terpenuhinya sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang pengembangan ekonomi rakyat". Sasarannya yaitu :

1. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Terwujudnya Transparansi Pelayanan.

Adapun rencana yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar dalam lima tahun kedepan sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut

| No | Indikator | satuan | Kondisi Kinerja tahun 2015 | Target capaian setiap tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD |
|----|-------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jumlah Arus penumpang angkutan umum | orang | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 | 86,000 |
| 2. | Rasio Izin Trayek | | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 | 0.0465 |
| 3. | Jumlah Uji kir angkutan Umum | buah | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 |
| | | | | | | | | | | |

| No | Indikator | satuan | Kondisi Kinerja tahun 2015 | Target capaian setiap tahun | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD |
|----|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | buah | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Angkutan Darat | angkutan | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 6,079 | 6,079 |
| 6. | Kepemilikan KIR angkutan umum | buah | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 | 6,495 |
| 7. | Lama Pengujian Kelayakan angkutan umum (KIR) | hari | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum -Bus -Mobil Penumpang | rupiah rupiah | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 | 66,000 56,000 |
| 9. | Pemasangan Rambu-rambu | unit | 79 | 50 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 398 |

BAB VIII

PENUTUP

Disusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memberikan arahan serta tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar. Rencana Strategis ini juga merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja (RENJA) Program dan Kegiatan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan atas pelaksanaan kinerja tahunan.

Untuk dapat berjalannya program dan kegiatan diperlukan kerjasama yang baik dengan seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, khususnya dari seluruh jajaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran ini disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai Misi Daerah 5 (Lima) tahun kedepan, terima kasih.

Tabel 6.1
Rencana Program ,Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar

| Tujuan | Sasaran | Proram dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|---|------------------|-------------|
| | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | |
| | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Urusan Perhubungan Meningkatkan pembangunan infrastruktur | 1 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kondisi baik | 100% | | | 100 % | 424.786.000,00 | 100 % | 458.900.000,00 | 100 % | 483.945.000,00 | 100 % | 508.142.250,00 | 100 % | 523.549.363,00 | 100 % | 2.399.322.613,00 | |
| | | Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Penyediaan jasa surat menyurat | | 100% | - | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 75.000.000 |
| | | 2 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | 100% | 150.000.000 | 100% | 150.000.000 | 100% | 160.000.000 | 100% | 170.000.000 | 100% | 170.000.000 | 100% | 170.000.000 | 100% | 800.000.000 |
| | | 3 Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas | | | | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 75.000.000 |
| | | 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 250.000.000 |
| | | 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 180.000.000 |
| | | 6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan | | | | 100% | 25.000.000,00 | 100% | 25.000.000,00 | 100% | 30.000.000,00 | 100% | 30.000.000,00 | 100% | 30.000.000,00 | 100% | 30.000.000 | 100% | 140.000.000 |
| | | 7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | | | | 100% | 15.000.000,00 | 100% | 8.000.000,00 | 100% | 8.000.000,00 | 100% | 8.000.000,00 | 100% | 8.000.000,00 | 100% | 10.000.000 | 100% | 49.000.000 |
| | | 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | | 100% | 7.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 8.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 41.000.000 |
| | | 9 Penyediaan makan dan minum | | | | 100% | 10.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 15.000.000 | 100% | 65.000.000 |
| | | 10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | | | | - | - | 100% | 57.786.000 | 100% | 97.900.000 | 100% | 97.945.000 | 100% | 97.142.250 | 100% | 98.549.363 | 100% | 449.322.613 |
| | | 11 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknik | | | | 100% | 55.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 275.000.000 |
| Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur | | | | | | | 187.500.000 | | 789.050.000 | | 573.502.500 | | 607.427.625 | | 2.157.480.125 | | 4.314.960.250 | | |
| 1 Pembangunan gedung Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | | | | | 55.000.000,00 | | 250.000.000,00 | | 75.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 80.000.000 | | 540.000.000 | | |
| 4 Pengadaan Moubeleur | | | | | | | 80.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 80.000.000,00 | | 90.000.000,00 | | 70.000.000 | | 390.000.000 | | |
| 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | | | | | 17.500.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 817.500.000 | | |
| 6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | | | | | 20.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 60.000.000 | | 230.000.000 | | |

